

**EFEKTIVITAS PROGRAM PASAR MURAH BHAKTI SOSIAL
TERPADU (BST) OLEH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN**



Oleh:

ANISA RACHMAWATI

D0114010

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**



Drs. Is Hadri Utomo, M. Si.

NIP. 195909071987021001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan disahkan oleh panitia penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada hari : Selasa
Tanggal : 31 Juli 2018
Panitia penguji :

1. Ketua : Dra. Sudaryanti, M. Si
NIP. 195704261986012002

2. Sekretaris : Dra. Retno Suryawati, M. Si
NIP. 196001061987022001

3. Pembimbing : Drs. Is Hadri Utomo, M. Si
NIP. 195909071987021001

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta,



Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
NIP 196108251986012001

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi yang berjudul : “Efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun” ini adalah karya saya sendiri dan bebas dari plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi pada skripsi, pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai *author* dan institusi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan skripsi), saya tidak melakukan publikasi sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka Prodi Ilmu Administrasi Negara maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta, 14 Agustus 2018



Anisa Rachmawati
Anisa Rachmawati

D0114010

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah: 5 – 6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah: 286)

“...Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 153)

“Manusia hebat adalah Manusia yang bisa mengendalikan diri disaat dikuasai amarah, Tenang saat dipermalukan, Tersenyum disaat diremehkan, Bersabar saat menemui cobaan dan Bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Suprijadi dan Ibu Yuli Astuti Purnawati yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tidak pernah putus untuk saya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menjadi motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun”**.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Is Hadri Utomo, M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Lestariningsih, M. Si. selaku dosen pembimbing akademik atas kesediaan memberikan bimbingan akademis yang telah diberikan selama ini
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas ilmu yang diberikan selama ini.

4. Bapak Agus Soejudi, S. E. selaku Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun atas informasi yang diberikan dan kerjasamanya selama penelitian.
5. Ibu Dyah Kuswardani, S. E., M. M. selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun atas informasi yang diberikan dan kerjasamanya selama penelitian.
6. Bapak Didik Kuswandi Kepala Desa Klangon, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas segala informasi dan kesediaannya bekerjasama selama penelitian
7. Bapak Widodo selaku Ketua RT 24 Desa Klangon, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas informasi dan kerjasamanya selama penelitian
8. Ibu Yatini, Bapak Pardi dan Bapak Nyono selaku warga penerima bantuan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atas kesediaannya memberikan informasi selama penelitian.
9. Saudara seperantauanku dari Madiun selama menimba ilmu di Surakarta yaitu Melinda, Arum dan Katarina yang menemaniku dari awal kuliah hingga sampai pada penyusunan skripsi
10. Sahabatku sejak SMP, Benedicta Winda dan sahabatku sejak SMA Suci Fatmawati yang telah saling menyemangati untuk sama-sama menyelesaikan studi masing-masing.

11. Saudaraku selama kuliah, Heippy, Ana, Mutia dan Tami yang selalu memberi semangat dan menemani penulis melewati masa-masa kuliah.
12. Keluarga KKN Karangasem Gunungkidul yaitu Rizky Agung, Nike, Kisty, Stephanie, Qorina, Yuliana, Duwi Wahyu dan Murnanda yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis sejak dipertemukan lewat KKN.
13. Teman-temanku Administrasi Negara angkatan 2014

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari skripsi ini karena adanya keterbatasan teknik dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10

C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Efektivitas.....	19
2. Dimensi Efektivitas.....	22
3. Definisi Program.....	27
4. Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST).....	29
C. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pemilihan Informan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Validitas Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	53

1. Efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.....	53
a. Pencapaian Tujuan/Hasil Program atau Kebijakan.....	58
b. Efisiensi	61
c. Kepuasan Kelompok Sasaran.....	63
d. Daya Tanggap Klien.....	65
e. Sistem Pemeliharaan.....	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 3.1 Bagan Teknik Analisis Data.....	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia	
Tahun 2014 – 2016.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tangga dan Jiwa Miskin di Kabupaten Madiun	
Tahun 2016.....	4
Tabel 1.3 Data Distribusi Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Melalui	
Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun	
Tahun 2017.....	8
Tabel 2.1 Matriks Daftar Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Data Subsidi Harga Kebutuhan Pokok dalam Program	
Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) Tahun 2017.....	30

ABSTRAK

Anisa Rachmawati. D0114010. Efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018.

Kondisi kemiskinan membuat masyarakat miskin kesulitan dan terbebani dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Satu-satunya kabupaten yang konsen untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya adalah Kabupaten Madiun. Program bantuan tersebut bernama Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Adanya program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Madiun serta meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dengan menggunakan teori yang dikemukakan Nakamura yaitu: 1) pencapaian tujuan/hasil program kebijakan, yaitu menjelaskan apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuannya atau belum, 2) efisiensi, berkaitan dengan anggaran, waktu pelaksanaan dan sumber daya 3) kepuasan kelompok sasaran, melihat apakah kelompok sasaran sudah puas dengan program yang diberikan 4) daya tanggap klien, berkaitan dengan respon masyarakat dengan adanya program ini dan 5) sistem pemeliharaan, berkaitan dengan pemeliharaan program agar dapat terus berjalan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan untuk analisis yaitu sumber data narasumber/informan, sumber data tempat/lokasi dan sumber data dokumen/arsip. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Untuk pengumpulan data digunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik melihat dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi data sumber. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan 5 indikator efektivitas, diketahui bahwa efektivitas program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini cukup efektif dan telah tercapai tujuannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah terpenuhinya 4 indikator yaitu, pencapaian tujuan/hasil program, efisiensi, daya tanggap klien dan sistem pemeliharaan. Namun demikian untuk indikator kepuasan kelompok sasaran belum sepenuhnya tercapai karena masyarakat masih mengeluhkan sistem pendistribusian kupon dimana ada masyarakat yang tidak mendapatkan kupon sesuai haknya.

Kata kunci: Efektivitas, Kebutuhan Pokok, Kemiskinan, Pasar Murah

ABSTRACT

Anisa Rachmawati. D0114010. Effectiveness of the Integrated Social Service Cheap Market Program by the Department of Trade, Cooperatives and Micro Enterprises of Madiun Regency, Thesis, Departement of State Administration Science, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, 2018.

The condition of poverty makes the poor difficulty and burdened in the fulfillment of basic needs. The only district that concentrates on helping the poor in fulfilling their basic needs is Madiun Regency. The aid program is called Integrated Social Service of Cheap Market Program, which is organized by the Department of Trade, Cooperatives and Micro Enterprises of Madiun Regency. The existence of this program aims to meet the basic needs of poor households in the district of Madiun and ease the burden of the poor in meeting basic needs.

The purpose of this study was to describe effectively the Integrated Social Service of Cheap Market Program carried out by the Madiun District Trade, Cooperatives and Micro Enterprises Office using the theory proposed by Nakamura, namely: 1) program objectives / results, which explained the program according to the problem or not, 2) efficiency, costs with and power of resources 3) satisfaction of the target group, see if the target group is satisfied with the program provided 4) resilient resilience, with the responsibility of the community with this program and 5) maintenance system , including maintenance of the program so that it can continue

This study used descriptive qualitative method. The data used for analysis is the source of data sources / informants, data sources of place / location and document / archive data sources. The sampling technique used is purposive sampling. For data collection used interview techniques, observation techniques and document viewing techniques. Data validity uses source data triangulation. While data analysis techniques use interactive analysis techniques. Based on the analysis and discussion that has been carried out with 5 effectiveness indicators, it is known that the effectiveness of the Integrated Social Service of Cheap Market Program is quite effective and has achieved its objectives. This can be proven by the fulfillment of 4 indicators, namely, achievement of program objectives / results, efficiency, responsiveness of clients and maintenance systems. However, the target group satisfaction indicator has not been fully achieved because the community still complains about the coupon distribution system where there are people who do not get a coupon according to their rights.

Keywords: Effectiveness, Needs, Poverty, Cheap Market

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dikategorikan sebagai salah satu masalah yang paling sulit untuk dipecahkan. Hampir setiap negara dihadapkan dengan masalah kemiskinan, baik negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan merupakan keadaan di mana pendapatan tidak dapat mencukupi kebutuhan harian. Kemiskinan mendorong rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan rendahnya kualitas hidup masyarakat karena tidak mampu menunjang kebutuhan pokoknya. Selain itu, kemiskinan juga dapat di artikan sebagai sebuah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan sulit memperoleh kualitas hidup yang sesuai dengan kemanusiaan. (Laksmi, 2017).

Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak lepas dari masalah kemiskinan. Saat ini di Indonesia masalah kemiskinan masih menjadi masalah klasik yang sulit untuk diselesaikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).Angka tersebut meningkat sebanyak 6.900 sejak September 2016. (www.detikfinance.com). Menurut Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan bahwa angka kemiskinan di Pulau Jawa sendiri tergolong tinggi. Jumlah penduduk miskin terbesar berada di Pulau Jawa karena jumlah penduduk terbesar dan terpadat juga berada di Pulau Jawa (www.bisnis.tempo.com)

Hal tersebut juga dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan tentang jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu)

Tahun 2014 - 2016

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2014	2015	2016
Indonesia	27727.79	28513.6	27764.32
Aceh	837.42	859.41	841.31
Sumatera Utara	1360.6	1508.14	1452.55
Sumatera Barat	354.74	349.53	376.51
Riau	498.28	562.92	501.59
Jambi	281.75	311.56	290.81
Sumatera Selatan	1085.8	1112.53	1096.5
Bengkulu	316.5	322.83	325.6
Lampung	1143.93	1100.68	1139.78
Kepulauan Bangka Belitung	67.23	66.62	71.07
Kepulauan Riau	124.17	114.83	119.14
DKI Jakarta	412.79	368.67	385.84
Jawa Barat	4238.96	4485.65	4168.11
Jawa Tengah	4561.82	4505.78	4493.75
DI. Yogyakarta	532.59	485.56	488.83
Jawa Timur	4748.42	4775.97	4638.53
Banten	649.19	690.67	657.74
Bali	195.95	218.79	174.94
Nusa Tenggara Barat	816.62	802.29	786.58
Nusa Tenggara Timur	991.88	1160.53	1150.08
Kalimantan Barat	381.92	405.51	390.32
Kalimantan Tengah	148.82	148.13	137.46

Kalimantan Selatan	189.5	189.16	184.16
Kalimantan Timur	252.68	209.99	211.24
Kalimantan Utara	-	40.93	47.03
Sulawesi Utara	197.56	217.15	200.35
Sulawesi Tengah	387.06	406.34	413.15
Sulawesi Selatan	806.35	864.51	796.81
Sulawesi Tenggara	314.09	345.02	327.29
Gorontalo	195.1	206.51	203.69
Sulawesi Barat	154.69	153.21	146.9
Maluku	307.02	327.78	331.79
Maluku Utara	84.79	72.65	76.4
Papua Barat	225.46	225.54	223.6
Papua	864.11	898.21	914.87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dari data diatas menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak pada rentang tahun 2014-2016 adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 4638.53 ribu jiwa. Inilah yang menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh pemerintah daerah kota atau kabupaten di Jawa Timur untuk dapat merespon banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut dengan membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di wilayah Jawa Timur.

Satu-satunya kabupaten dari 29 kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara continue memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin di wilayahnya adalah Kabupaten Madiun. Berbicara tentang kemiskinan, penduduk miskin di Kabupaten Madiun pada tahun 2016 mencapai 67.869 rumah tangga miskin dari 238.762 rumah tangga di Kabupaten Madiun. Kemiskinan ini tersebar pada 206 desa/kelurahan. Adapun

jumlah dan persebaran penduduk miskin di kabupaten Madiun berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tangga dan Jiwa Miskin di Kabupaten Madiun
Tahun 2016

No	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin	Jiwa Miskin
1	Kebonsari	2.865	6.239
2	Geger	4.717	13.984
3	Dolopo	2.218	5.862
4	Dagangan	5.542	15.931
5	Wungu	3.926	10.720
6	Kare	5.269	15.408
7	Gemarang	5.388	12.994
8	Saradan	9.975	26.632
9	Pilangkenceng	5.873	15.774
10	Mejayan	3.891	9.025
11	Wonoasri	3.608	9.286
12	Balerejo	6.362	17.735
13	Madiun	2.204	5.587
14	Sawahan	3.137	7.689
15	Jiwan	2.894	4.866
	Jumlah	67.869	177.732

Sumber: BPS Kabupaten Madiun Dalam Angka 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin dan jiwa miskin terbanyak di wilayah Kabupaten Madiun berada di Kecamatan Saradan yaitu sejumlah 9.975 rumah tangga miskin dan 26.632 jiwa miskin. Secara keseluruhan total jumlah rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Madiun pun mencapai 67.869 rumah tangga miskin dan 177.732 jiwa miskin. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Madiun cukup tinggi.

Pada dasarnya kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat hidup dengan taraf hidup rendah dengan ditandai penghidupan penduduk yang serba kekurangan dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok (Sartika, 2016). Melihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun yang cukup tinggi seperti yang telah tergambar dalam tabel diatas, pemerintah Kabupaten Madiun berusaha merespon persoalan tersebut dengan memberikan subsidi bagi masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayah Kabupaten Madiun. Subsidi dianggap mampu berfungsi sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat serta dapat meminimalisasi ketimpangan akan akses barang dan jasa (Christina, 2013). Subsidi yang diberikan pemerintah Kabupaten Madiun terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayahnya adalah subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST).

Program Pasar Murah ini merupakan salah satu program yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Madiun dalam sebuah kegiatan rutin yang bernama Bhakti Sosial Terpadu (BST). Dalam pelaksanaan Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini meliputi beberapa kegiatan seperti, program Pasar Murah, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, bantuan alat pertanian dan lain sebagainya (Nuradilla, 2016). Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang salah satu kegiatan dalam Bhakti Sosial Terpadu yaitu program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) sebagai program subsidi harga kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayah Kabupaten Madiun.

Berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2017 menyatakan bahwa program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) merupakan program bantuan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Madiun untuk membantu masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayah Kabupaten Madiun agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan dari bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini adalah agar masyarakat desa di Kabupaten Madiun dapat membeli kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih murah dari harga pasar pada umumnya.

Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun yang berbentuk bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini telah berlangsung sejak tahun 2000 hingga saat ini. Hal tersebutlah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa peneliti hendak melakukan penelitian di Kabupaten Madiun, karena Kabupaten Madiun secara konsisten telah memberikan bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ke masyarakat miskin di wilayahnya selama kurang lebih 17 tahun. Secara garis besar, bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini menggunakan sistem jemput bola yaitu dengan mendatangi langsung desa dan kelurahan se-Kabupaten Madiun yang telah ditetapkan sebagai desa sasaran (Nuradilla, 2016). Bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini diberikan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Setiap tahunnya dari setiap kecamatan tersebut terdapat satu desa yang diberikan bantuan program subsidi harga kebutuhan pokok ini. Program

Pasar Murah bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini diberikan secara berkala yaitu setiap satu bulan sekali ke desa-desa sasaran yang telah ditetapkan.

Bantuan ini berbentuk subsidi harga barang kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir dan mie instan. Sistem pemberian bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini berupa pendistribusian kupon yang sebelumnya telah dibagikan dengan melibatkan petugas kantor desa yang dinilai mengetahui kondisi ekonomi warganya supaya tidak salah sasaran. Masyarakat desa penerima kupon tersebut dapat membeli kebutuhan pokok yang diperlukan saat program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) berlangsung di desa mereka masing-masing. Masyarakat dapat membeli keempat kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga di pasar dengan membawa kupon yang telah dibagikan petugas kantor desa kepada mereka. Anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan subsidi harga kebutuhan pokok melalui kegiatan Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun ini dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun. Bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini diberikan secara berkala kepada masyarakat desa yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Madiun. Anggaran yang diberikan untuk masing-masing desa sasaran adalah Rp 20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Subsidi harga barang kebutuhan pokok melalui program pasar murah ini dilakukan di desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Madiun dengan

maksud diperuntukkan untuk masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun desa-desa yang menerima bantuan subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di wilayah Kabupaten Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Data distribusi subsidi harga kebutuhan pokok melalui program
Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun
Tahun 2017

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan
1.	Desa Ketawang	Kecamatan Dolopo
2.	Desa Sareng	Kecamatan Geger
3.	Desa Sukosari	Kecamatan Dagangan
4.	Desa Kebonsari	Kecamatan Kebonsari
5.	Desa Ngetrep	Kecamatan Jiwan
6.	Desa Sumberejo	Kecamatan Madiun
7.	Desa Pule	Kecamatan Sawahan
8.	Desa Babadan Lor	Kecamatan Balerejo
9.	Desa Banaran	Kecamatan Balerejo
10.	Desa Purworejo	Kecamatan Pilangkenceng
11.	Desa Klangon	Kecamatan Saradan
12.	Desa Mojopurno	Kecamatan Wungu
13.	Desa Bancong	Kecamatan Wonoasri
14.	Desa Geger	Kecamatan Geger

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun

Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah daerah selalu ada *leading sector* atau pelaksana sekaligus penanggung jawab dari program tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun. Seperti yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2017 menetapkan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bertindak

sebagai pelaksana dan penanggung jawab program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun memegang peran penting dalam pelaksanaan program subsidi harga kebutuhan pokok melalui kegiatan Pasar Murah BST ini. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan bantuan subsidi harga kebutuhan pokok tersebut ke masyarakat desa sasaran di wilayah Kabupaten Madiun.

Namun dalam pelaksanaannya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini bukan tanpa masalah. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Bapak Agus Soejudi, S. E. dalam wawancara prasurvey tanggal 17 Oktober 2017 di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa pada program Pasar Murah BST ini terdapat beberapa masalah seperti, 1) Keterlambatan pencairan anggaran, 2) Jumlah anggaran yang kurang memadai, 3) Masalah pendistribusian kupon yang tidak tepat. Selain ketiga masalah tadi, berdasarkan informasi dari masyarakat menyatakan bahwa dalam program Pasar Murah BST ini juga terjadi masalah adanya masyarakat miskin yang tidak menerima kupon Pasar Murah.

Timbulnya masalah-masalah pada program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) seperti diatas, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu

(BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yaitu: Bagaimana efektivitas program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dalam penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan yang lebih luas mengenai program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Choi, Sung Eun; Seligman, Hilary and Basu, Sanjay tahun 2017 dengan judul *Cost Effectiveness of Subsidizing Fruit and Vegetable Purchases Through the Supplemental Nutrition Assistance Program*.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk dapat melihat tentang bagaimana pengaruh subsidi harga buah dan sayuran terhadap kesehatan masyarakat. Dalam jurnal ini membahas apakah dengan subsidi harga buah dan sayuran sebagai makanan pokok dapat meningkatkan nutrisi yang diterima masyarakat atau tidak. Penelitian ini menekankan pada efektivitas subsidi harga buah dan sayur dalam meningkatkan nutrisi dan kesehatan masyarakat. Hasilnya menjelaskan bahwa subsidi harga kebutuhan pokok buah dan sayur dapat membantu meningkatkan nutrisi dan kesehatan masyarakat.

2. Christina, Natalia. Tahun 2013. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan di Kabupaten Malinau (Studi pada Kecamatan Kayan Selatan)*

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan subsidi penerbangan daerah perbatasan di Kayan Selatan dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh jadwal penerbangan yang masih terbatas dan kapasitas penumpang yang masih kurang bagi masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan subsidi barang setidaknya telah mengurangi beban dan telah mengurangi beban dan mengurangi aktivitas masyarakat perbatasan kenegara Malaysia. Namun jumlah barang yang disubsidikan tersebut tidak cukup untuk 1 (tahun).

3. Nasila, Jans Wilianto. Tahun 2014. *Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), Studi tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebar kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), kurang berhasil (efektif) meningkatkan pendapatan warga yang memiliki usaha bersama di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Hasil analisis tabel tentang pemberian modal usaha untuk dapat memberikan motivasi kepada warga yang tergabung dalam kelompok usaha bersama memperoleh skor rata-rata 1,5 dalam kategori sedang. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa bantuan modal berasal dari Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu, kurang efektif dapat

memberikan dorongan atau semangat kepada warga yang tergabung dalam kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan persentase jawaban, terdapat 25 persen responden menjawab selalu bersemangat, sebagian besar atau 50 persen responden menjawab kadang-kadang bersemangat, dan 25 persen responden yang menjawab tidak pernah termotivasi dalam meningkatkan pendapatannya.

4. Nuradilla, Firdasari. Tahun 2016. *Inovasi Pelayanan Publik Melalui Bhakti Sosial Terpadu (BST) (Studi Pada Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun serta menjelaskan adanya faktor pendorong dari pelaksanaan BST ini seperti kebutuhan yang mendesak, kepemimpinan yang baik dan perencanaan yang matang serta faktor penghambat dari pelaksanaan BST seperti sikap enggan berubah yang ditunjukkan masyarakat dan kesiapan dari masyarakat yang menerima bantuan itu sendiri.

5. Sovacool, Benjamin K. tahun 2016 dengan judul *Reviewing, Reforming and Rethinking Global Energy Subsidies: Towards a Political Economy Research Agenda*

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan secara lebih detail dan mendalam tentang efektivitas dari adanya subsidi energi. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana efektivitas

dari subsidi energi yang ada selama ini dengan cara meninjau kembali, mereformasi dan memikirkan kembali apakah subsidi energi ini efektif untuk masyarakat atau tidak. Dengan harapan nantinya akan menghasilkan perekonomian yang baik di negara tersebut. Hasilnya dengan adanya subsidi energi memang membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun ada beberapa subsidi energi tertentu yang harus direformasi atau ditinjau ulang. Agar program subsidi energi ini tidak menjadi kepentingan politik beberapa pihak.

Matriks 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Metode	Hasil	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Cost Effectiveness of Subsidizing Fruit and Vegetable Purchases Through the Supplemental Nutrition Assistance Program. (Sung Eun Choi dkk, Tahun 2017)	Metode penelitian kuantitatif	Penelitian ini membahas tentang efektivitas subsidi harga buah dan sayur dalam meningkatkan nutrisi dan kesehatan masyarakat. Hasilnya menjelaskan bahwa subsidi harga kebutuhan pokok buah dan sayur dapat membantu meningkatkan nutrisi dan kesehatan masyarakat.	Sama-sama meneliti tentang efektivitas sebuah program subsidi harga kebutuhan pokok manusia	Penelitian ini membahas tentang subsidi harga buah dan sayur sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia. Perbedaannya pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada jenis kebutuhan pokoknya. Dalam konteks ini komoditi kebutuhan pokok yang disubsidi adalah sembako seperti

					beras, gula, minyak goreng dan mie instan.
2.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan di Kabupaten Malinau (Studi pada Kecamatan Kayan Selatan) (Natalia Christina, Tahun 2013)	Metode Penelitian Kualitatif dengan observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data-data yang diperoleh dikumpulkan, dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan subsidi penerbangan daerah perbatasan di Kayan Selatan dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh jadwal penerbangan yang masih terbatas dan kapasitas penumpang yang masih kurang bagi masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan subsidi barang setidaknya telah mengurangi beban dan telah mengurangi beban dan mengurangi aktivitas masyarakat perbatasan kenegara Malaysia. Namun jumlah barang yang disubsidikan tersebut tidak cukup untuk 1 (tahun).	Sama-sama membahas tentang subsidi harga kebutuhan pokok yang dapat meringankan beban hidup masyarakat.	Jurnal ini lebih fokus pada implementasi kebijakan pemerintah tentang subsidi penerbangan sedangkan peneliti lebih fokus pada efektivitasnya.
3.	Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan	Metode penelitian Kualitatif	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini	Sama-sama meneliti tentang	Perbedaan terletak pada jenis program

	Masyarakat (PDPM), Studi tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu (Jans Wilianto Nasila, 2014)	dengan menyebar kuesioner	diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), kurang berhasil (efektif) meningkatkan pendapatan warga yang memiliki usaha bersama di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.	efektivitas sebuah program yang dilaksanakan di Indonesia serta sama-sama berfokus pada kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin	yang dibahas. Dalam penelitian ini program yang dibahas adalah Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)
4.	Inovasi Pelayanan Publik Melalui Bhakti Sosial Terpadu (BST) (Studi Pada Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) (Firdasari Nuradila, Tahun 2016)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah inovasi pelayanan public melalui Bhakti Sosial Terpadu (BST) berjalan baik dan cukup efektif. Namun ada beberapa faktor pendukung serta penghambat yang juga mempengaruhi pelaksanaan BST di Kabupaten Madiun ini.	Membahas kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) dimana dalam BST terdapat salah satu program yang akan dibahas oleh peneliti yaitu program Pasar Murah	Dalam penelitian ini dijelaskan pula faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun
5.	Reviewing, Reforming and Rethinking Global Energy Subsidies: Towards a Political Economy Research Agenda (Benjamin K. Sovacool, Tahun	Metode penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya subsidi energi memang membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun ada beberapa subsidi	Sama-sama membahas tentang adanya program subsidi bagi kehidupan masyarakat	Jurnal ini menjelaskan tentang kemanfaatan subsidi energi dan meninjau ulang subsidi-subsidi energi tertentu untuk kepentingan masyarakat bukan

	2016).		energi tertentu yang harus direformasi atau ditinjau ulang. Agar program subsidi energi ini tidak menjadi kepentingan politik beberapa pihak.		kepentingan politik.
--	--------	--	---	--	----------------------

Dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebuah program atau kebijakan publik bertujuan untuk membantu masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri namun seringkali tujuan ini tidak tercapai dengan maksimal maka dari itu perlu adanya kita mengetahui efektivitas dari sebuah program atau kebijakan publik
2. Dalam pelaksanaan program subsidi harga kebutuhan pokok seperti sembako dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat seperti kebutuhan yang mendesak, kepemimpinan yang baik dan perencanaan yang matang. Adapun faktor penghambat seperti sikap enggan untuk berubah dari masyarakat dan kesiapan dari masyarakat penerima bantuan subsidi harga tersebut.
3. Dengan adanya program bantuan subsidi harga kebutuhan pokok yang diberikan kepada masyarakat hal ini dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ketiga poin tersebut nantinya dapat membantu peneliti dalam penelitian ini dan akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada subyek penelitian, lokasi penelitian dan program yang menjadi obyek penelitian. Peneliti ingin melihat efektivitas program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Kelima penelitian terdahulu di atas membahas tentang efektivitas program subsidi harga dengan berbagai jenis barang seperti subsidi energi serta subsidi buah dan sayur. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu ingin meneliti tentang efektivitas program subsidi harga kebutuhan pokok atau sembako yang diwujudkan dalam bentuk Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

B. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas

Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Salah satu kriteria dasar menilai suatu program adalah dengan efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Gie (dalam Budiani, 2009) menyatakan bahwa efektivitas adalah:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya”

Sedangkan menurut Gibson (dalam Pasolong, 2008: 179) menyatakan bahwa:

“Efektivitas merupakan pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Jadi semakin tinggi pencapaian sasaran melalui suatu kegiatan dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka semakin tinggi pula efektivitasnya.”

Sementara itu McDonald dan Lawton (1997) dalam buku milik Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010:174) menyatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Selaras dengan itu, definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2002: 232) adalah menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output (target atau result)*. Dimana efektivitas dalam definisi tersebut merupakan perbandingan antara hasil yang didapat

dengan dampak yang akan dialami setelah implementasi suatu kebijakan atau program.

Adapun definisi efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2001:24) memberikan definisi efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi dari instansi tersebut. Dalam konteks kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan atau program tersebut dikatakan efektif apabila kebijakan atau program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Dimensi Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Guna menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan maka diperlukan pedoman atau acuan dasar untuk menilainya. Melalui pedoman tersebut maka dapat diketahui apakah suatu program dapat mencapai tujuannya atau belum. Henry, Brian dan White (dalam Wibawa, 1994: 65) mengemukakan beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program, yaitu:

- a. Waktu pencapaian
- b. Tingkat pengaruh yang diinginkan
- c. Perubahan perilaku masyarakat
- d. Pelajaran yang diperoleh
- e. Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya.

Budiani dalam Jurnal Ekonomi Sosial (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi mengenai program yang dijalankan sehingga informasi penting mengenai pelaksanaan program dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan tepat pada sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana peserta program mendapatkan kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan output yang dihasilkan dengan tujuan-tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantapan program, yaitu sejauh mana pengawasan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan dimensi efektivitas program menurut pendapat lain yaitu diungkapkan oleh Nakamura (dalam Wahab, 1997:43) yang mengemukakan lima dimensi atau kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program, yakni:

a. Pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan

Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah diimplementasikan, namun tanpa hasil yang dicapai tidak dapat diukur, dirasakan, maupun diamati dan dinikmati secara langsung oleh warga atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak berhasil atau gagal.

b. Efisiensi

Merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian suatu program dapat terimplementasi dengan baik apabila terdapat perbandingan terbaik atau kualitas program dengan biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan.

c. Kepuasan kelompok sasaran

Dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran. Kriteria ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengelola hasil-hasil program

tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan, maka program tersebut dianggap belum berhasil.

d. Daya tanggap klien

Dengan adanya daya tanggap yang positif dari masyarakat (dalam hal ini masyarakat atau kelompok sasaran) maka dapat dipastikan peran serta mereka pada kebijakan yang ada akan meningkat. Masyarakat akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksana. Ini berarti kebijakan akan mudah diimplementasikan.

e. Sistem pemeliharaan

Dalam hal ini pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinue maka betapapun baiknya hasil program akan dapat berhenti ketika bentuk nyata hasil dari program tersebut mulai pudar.

Dari pendapat beberapa ahli diatas, masing-masing mengemukakan kriteria atau indikator efektivitas yang berbeda-beda. Namun peneliti memilih satu teori yang dianggap relevan dengan judul skripsi ini yaitu teori kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Nakamura (dalam Wahab, 1997:43) yang menyatakan bahwa kriteria efektivitas itu ada lima, yaitu: pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien dan sistem pemeliharaan. Alasan pemilihan lima indikator efektivitas tersebut karena dari kelima indikator tersebut sesuai dengan lokasi

penelitian yang dilakukan peneliti. Lokasi penelitian yang diambil adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun selaku pelaksana dan penanggung jawab program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) serta masyarakat Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagai desa dengan jumlah penduduk miskin paling banyak yang menerima bantuan subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah ini. Kelima dimensi efektivitas menurut Nakamura ini dapat mendeskripsikan sebuah program atau kebijakan bukan hanya dilihat dari unsur pelaksanaannya tetapi juga dari unsur kelompok sasaran sebagai penerima dari adanya sebuah program.

Dari kelima kriteria efektivitas tersebut, untuk hasil indikator pencapaian tujuan/hasil program, efisiensi serta sistem pemeliharaan ini dapat dijabarkan lebih mendalam dengan menggali informasi pada lokasi penelitian di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk kriteria kepuasan kelompok sasaran dan daya tanggap klien dapat dijabarkan lebih mendalam dengan menggali informasi pada lokasi penelitian yang kedua yaitu masyarakat desa penerima bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini. Dalam penelitian ini, desa tempat lokasi penelitian adalah Desa Klangon, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Alasan pemilihan desa ini sebagai lokasi penelitian karena desa ini merupakan desa dengan jumlah rumah tangga miskin paling banyak di Kabupaten Madiun dan lokasinya yang terpencil jauh dari pusat pemerintahan. Tercatat pada tahun 2010 terdapat sebanyak 229 rumah tangga miskin di Desa Klangon,

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Kesesuaian antara kelima kriteria untuk mengukur efektivitas menurut Nakamura dengan lokasi penelitian yang diambil peneliti menjadi alasan mengapa peneliti memilih teori kriteria efektivitas program dari Nakamura.

3. Definisi Program

Definisi program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa program adalah rancangan-rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang dijalankan. Sedangkan menurut Pasolog (2008 : 92) menjelaskan definisi program yaitu:

“Program adalah kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Arikunto dan Jabar (2004:5), yang menjelaskan bahwa program terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai tujuan. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:

- a. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan
- b. Terdiri dalam waktu yang relatif lama, karena bukan merupakan kegiatan tunggal tetapi kegiatan jamak yang berkesinambungan satu sama lainnya

c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

(dalam Arikunto dan Jabar, 2004:3)

Sementara itu, menurut Wahab (2008 : 28-29), salah satu substansi dari kebijakan adalah kebijakan sebagai suatu program. Program merupakan suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legislasi, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya. Program-program atau sub-sub program dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program pemerintah pada dasarnya adalah program yang sifatnya penting karena tujuannya menyangkut nasib orang banyak. Oleh karena suatu program adalah perencanaan, maka perencanaan tersebut akan diarahkan pada pencapaian tujuan yang sebelumnya telah dipertimbangkan dengan sebijak mungkin agar tidak membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat.

4. Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST)

Seperti yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/69/KPTS/402.013/2017 tentang Subsidi Harga Kebutuhan Pokok bagi Masyarakat Miskin melalui Pasar Murah kepada Masyarakat Desa yang dilaksanakan dalam Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 ini menjelaskan bahwa program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) merupakan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk melaksanakan program subsidi harga kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun. Bhakti Sosial Terpadu (BST) sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mana di dalamnya terdapat banyak kegiatan-kegiatan berupa pemberian bantuan baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Salah satu jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah yang diberikan kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun.

Tujuan dari adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Madiun serta meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok. Komoditi yang disubsidi harganya dalam kegiatan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini antara lain, beras, minyak goreng, gula pasir dan mie instan.

Anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun ini dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun. Anggaran yang diberikan untuk masing-masing desa sasaran adalah Rp 20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Adapun besaran subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data subsidi harga kebutuhan pokok dalam program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) tiap desa Tahun 2017

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Pasar	Harga Pasar Murah	Subsidi	Jumlah Subsidi
1.	Beras	1900 kg	Rp 8.000,-/kg	Rp 6.500,-/kg	Rp 1.500,-/kg	Rp 2.850.000,-
2.	Minyak Goreng	1900 lt	Rp 13.500,-/lt	Rp 10.000,-/lt	Rp 3.500,-/lt	Rp 6.650.000,-
3.	Gula Pasir	1900 kg	Rp 13.500,-/kg	Rp 10.000,-/lt	Rp 3.500,-/lt	Rp 6.650.000,-
4.	Mie Instan	192 dus	Rp 100.000,-/dus	Rp 80.000,-/dus	Rp 20.000,-/dus	Rp 3.840.000,-
Total Subsidi						Rp. 19.990.000,-

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun

Sistem pemberian bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini berupa pendistribusian kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun dengan melibatkan perangkat desa setempat yang dinilai mengetahui kondisi ekonomi warganya agar tidak salah sasaran. Adapun kriteria miskin yang digunakan oleh perangkat desa dalam

proses pendistribusian kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) adalah kriteria miskin menurut standard Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.

Masyarakat desa penerima kupon tersebut dapat membeli kebutuhan pokok yang diperlukan saat program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) berlangsung di desa mereka masing-masing. Masyarakat dapat membeli keempat kebutuhan pokok tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga di pasar dengan membawa kupon yang telah dibagikan petugas kantor desa kepada mereka. Bantuan ini sifatnya bukan hibah namun subsidi harga. Jadi masyarakat tetap harus membeli komoditi apa yang dia perlukan saat pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini diselenggarakan di desa masing-masing tentunya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar pada umumnya.

Program Pasar Murah ini dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Di setiap kecamatan, terdapat satu desa yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu

(BST). Bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini diberikan secara berkala kepada masyarakat desa yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Madiun. Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah daerah selalu ada *leading sector* atau pelaksana sekaligus penanggung jawab dari program tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun. Seperti yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2017 menetapkan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bertindak sebagai pelaksana dan penanggung jawab program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun memegang peran penting dalam pelaksanaan program subsidi harga kebutuhan pokok melalui kegiatan Pasar Murah BST ini. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan bantuan subsidi harga kebutuhan pokok tersebut ke masyarakat desa sasaran di wilayah Kabupaten Madiun.

C. Kerangka Berpikir

Kemiskinan menjadi salah satu alasan bagi masyarakat miskin kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Padahal kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula dan mie instan sangat penting bagi konsumsi pangan mereka sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang sering tidak stabil dan terkadang bisa melonjak drastis dirasa sangat memberatkan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal inilah yang mendasari Pemerintah

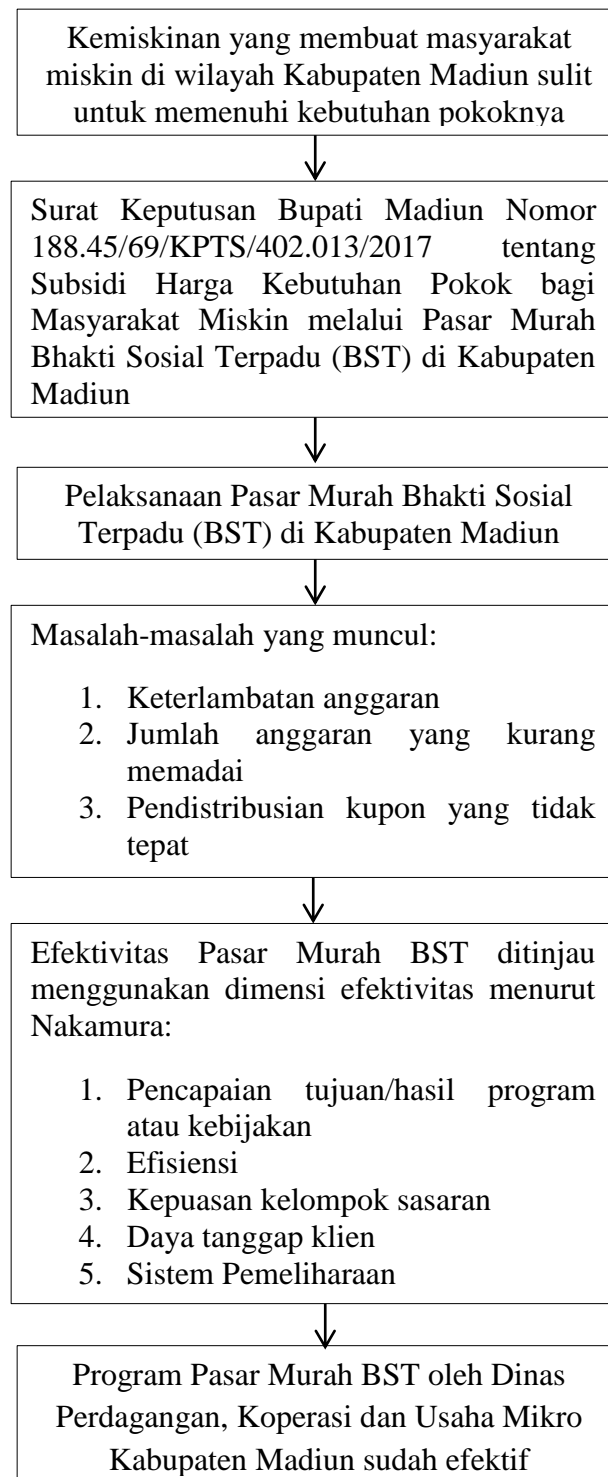
Kabupaten Madiun mengeluarkan kebijakan tentang subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST). Program ini dikeluarkan agar kebutuhan pokok masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun dapat terpenuhi.

Berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/69/KPTS/402.013/2017 tentang Subsidi Harga Kebutuhan Pokok bagi Masyarakat Miskin melalui Pasar Murah kepada Masyarakat Desa yang dilaksanakan dalam Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaksana program ingin membantu masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun dalam memenuhi kebutuhannya. Bantuan tersebut berupa subsidi harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan mie instan yang diwujudkan dalam program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST).

Namun dalam proses pelaksanaan program ini masih terdapat masalah-masalah seperti keterlambatan pencairan anggaran, jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah kurang memadai serta pendistribusian kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang terkadang kurang tepat sasaran. Melihat adanya masalah seperti ini, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang efektivitas dari program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melakukan analisis efektivitas program, peneliti menggunakan teori kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Nakamura yaitu: pencapaian tujuan/hasil program atau

kebijakan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien dan sistem pemeliharaan.

Bagan 2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan mengenai efektivitas program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro secara mendalam. Dalam penelitian jenis deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih bermakna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar sajian angka atau frekuensi (H.B. Sutopo, 2002: 35). Penelitian deskriptif kualitatif sangat cenderung mementingkan makna, sedangkan makna sangatlah tergantung pada prosesnya. Oleh karena itu, penelitian ini harus lebih mementingkan penjelasan proses daripada produknya.

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus untuk menggambarkan bagaimana keefektifan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro melalui data yang terkumpul. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan, memaparkan, menerangkan serta menafsirkan secara terperinci mengenai keefektifan program tersebut melalui indikator-indikator yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk melakukan penelitian yang berfungsi sebagai objek untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun penelitian ini mengambil beberapa lokasi yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, dengan alasan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun sebagai *leading sector* atau pelaksana serta penanggung jawab program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun. Selain itu karena Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun merupakan dinas yang membidangi dari program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST).
2. Desa Klangon, Kecamatan Saradan sebagai salah satu desa penerima bantuan subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST). Pemilihan Desa Klangon, Kecamatan Saradan sebagai lokasi penelitian, dikarenakan Desa Klangon merupakan desa paling miskin di wilayah Kabupaten Madiun dengan jumlah rumah tangga miskin mencapai 229 rumah tangga serta lokasi Desa Klangon yang jauh dari pusat pemerintahan dan perdagangan. Selain itu, Kecamatan Saradan sebagai kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak di wilayah Kabupaten Madiun yaitu sebanyak

9.975 rumah tangga miskin dan 26.632 jiwa miskin serta lokasinya yang terpencil jauh dari pusat Kabupaten Madiun.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, sumber data dapat berupa manusia (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, dokumen dan arsip. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, yaitu pihak yang berkepentingan atau memahami tentang apa yang kita teliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan yang diwawancarai oleh peneliti antara lain:

- a. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun
- b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun
- c. Kepala Desa Klangon Kecamatan Saradan
- d. Pihak yang membantu pendistribusian, seperti Ketua RT Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

- e. Beberapa masyarakat Desa Klangon Kecamatan Saradan sebagai penerima bantuan subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST)

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2005: 62), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya berbentuk buku atau publikasi-publikasi melalui catatan-catatan yang terkait dengan penelitian, adapun dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud:

- a. Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2017 tentang Subsidi Harga Kebutuhan Pokok bagi Masyarakat Miskin melalui Pasar Murah kepada Masyarakat Desa yang dilaksanakan dalam Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun
- b. Proposal kegiatan subsidi harga kebutuhan pokok melalui program pasar murah Bhakti Sosial Terpadu (BST)

- c. Nota dinas perihal pencairan anggaran subsidi harga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun
- d. SPJ subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Klangon Kecamatan Saradan Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
- e. Daftar penerima kupon pasar murah dalam rangka pasar murah dalam rangka Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
- f. www.jatim.bps.go.id

D. Teknik Pemilihan Informan

Teknik sampling yang digunakan mengikuti penelitian kualitatif, dimana pada penelitian kualitatif tidak mengenal cuplikan statistik tetapi menggunakan sampel bertujuan atau *purposive sampling*. Hal ini dilakukan karena dipandang mampu menangkap kedalaman informasi dalam menghadapi realitas jamak. Jadi dengan sampling ini peneliti dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan permasalahan penelitian dengan memilih sekelompok subjek atau informan yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan keadaan populasi yang ada, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil

dari beberapa pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun yang dikhususkan pada pegawai bagian Perdagangan yang membidangi program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) serta beberapa masyarakat miskin penerima bantuan subsidi harga kebutuhan pokok di Desa Klangon Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang dipilih sebagai sampel karena wilayah Kecamatan Saradan merupakan wilayah dengan jumlah masyarakat miskin paling banyak di Kabupaten Madiun

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat serta mampu menjawab permasalahan, maka digunakan beberapa teknik yang sesuai dengan sifat dan jenis data yang ada. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara menggali informasi secara langsung terhadap narasumber atau informan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Menurut H.B Sutopo (2002:59), wawancara di dalam penelitian kualitatif dilakukan secara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik “wawancara mendalam”. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “*open-ended*”, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta

dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara jauh dan mendalam (*in-depth-interviewing*).

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya, dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara. Untuk melakukan penggalian informasi yang lebih dalam, peneliti melakukan improvisasi dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tambahan berkaitan dengan jawaban atau pertanyaan dari informan.

2. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar (H.B Sutopo, 2002:64). Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik observasi berperan pasif, yaitu peneliti tidak memiliki wewenang dalam mengatur program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Peneliti hanya mengamati dan menggali informasi sesuai keadaan yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat data yang ada di lapangan maupun dalam bentuk berkas. Menurut H.B Sutopo (2002:70), dalam melakukan teknik pengumpulan data ini, dokumen yang ditemukan wajib dikaji kebenarannya baik secara eksternal yang berkaitan dengan keaslian dokumen, dan juga secara internal yang berkaitan dengan kebenaran isi dokumen atau pernyataan yang ada.

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam dokumentasi adalah sumber- sumber tertulis seperti hasil wawancara, arsip/surat/dokumen yang menyangkut tentang Peraturan atau Undang-Undang yang terkait dengan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, laporan-laporan penelitian terdahulu, literatur buku, media massa serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian.

F. Validitas Data

Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, teknik pengembangan validitas data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi. Terdapat empat macam teknik triangulasi menurut H.B.Sutopo (2006:92). Keempat teknik triangulasi tersebut yaitu:

1. Triangulasi data (sumber), dengan cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.
2. Triangulasi peneliti, yang dimaksud triangulasi peneliti adalah hasil penelitian yang baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. Dari pandangan atau tafsir yang dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap semua informasi yang berhasil digali dan dikumpulkan yang berupa catatan, dan bahkan sampai dengan simpulan-simpulan sementara, diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih memantapkan hasil akhir penelitian
3. Triangulasi metodologis, teknik triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Di sini ditekankan adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.
4. Triangulasi teoritis, triangulasi jenis ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Misalnya, suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat, tidak hanya dikaji dari perspektif sosial saja,

tetapi juga digunakan perspektif teori yang lain, misalnya dari teori budaya, politik atau ekonomi.

Dari keempat triangulasi diatas, peneliti menggunakan triangulasi data (sumber) dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda, misalnya mengenai program bantuan subsidi harga kebutuhan pokok yang digali dari sumber data yang berupa informan, arsip dan peristiwa. Alasan dari pemilihan triangulasi data (sumber) dalam penelitian ini adalah karena dengan menggunakan triangulasi ini dapat mencegah terjadinya subyektivitas. Karena program yang diteliti merupakan program yang diimplementasikan ke masyarakat, jadi penelitian tidak hanya terfokus pada satu sumber saja. Hal ini agar naarsumber atau informan yang diwawancarai berbeda-beda agar dapat menggali secara lebih dalam informasi yang dibutuhkan. Serta agar peneliti bisa membandingkan data yang sejenis untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam hal ini yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro selaku pelaksana program dengan data atau informasi yang diperoleh dari masyarakat miskin penerima kupon Pasar Murah. Selain itu, data base akan tetap disimpan agar dapat ditelusuri kembali bila dikehendaki. Triangulasi dilakukan dengan cara menanyakan satu masalah terhadap beberapa orang sehingga akan diperoleh informasi yang sama

atau hampir sama yang menjadi dasar dalam membuat kesimpulan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

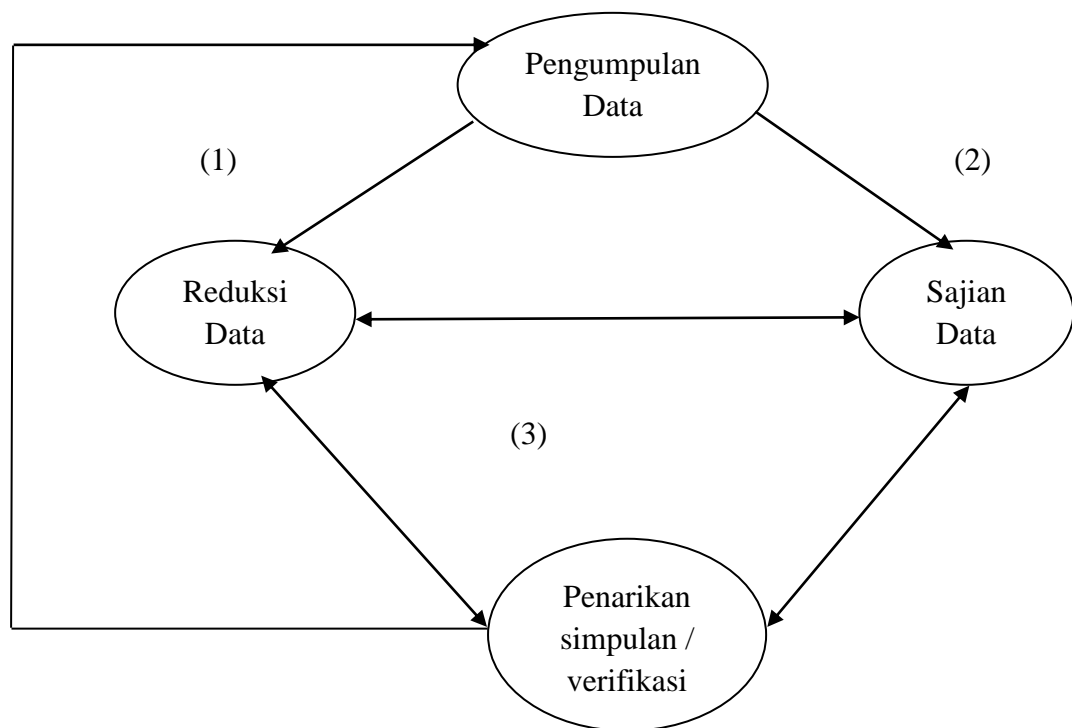
Analisis penelitian kualitatif bersifat induktif, bahwa semua simpulan dibentuk dari semua informasi yang diperoleh dari lapangan. Proses analisis ini dilakukan bersamaan sejak awal dengan proses pengumpulan data, dengan melakukan beragam teknik refleksi bagi pendalaman dan pemantapan data. Setiap data yang diperoleh akan selalu dikomparasikan, setiap unit atau kelompoknya untuk melihat keterkaitannya sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu bagi pemantapan dan pendalaman data proses yang dilakukan selalu dalam bentuk siklus, sebagai usaha verifikasi.

Pada tiap kasusnya proses analisisnya akan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman, 1984). Dalam model ini meliputi tiga komponen analisis yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data adalah membuat semacam rangkuman dari informasi yang diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Sajian data adalah menyajikan data yang sejenis sehingga membentuk informasi yang saling terkait dan mendukung. Dalam sajian data disertai dengan penjelasan-

penjelasan sehingga dari informasi yang tersusun tersebut akan memperjelas bagi pembaca untuk memahaminya. Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah mengambil kesimpulan berdasarkan sajian data. Dari berbagai informasi yang tersusun dalam sajian data yang disertai dengan penjelasan akan mempermudah dalam memberikan kesimpulan.

Adapun proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.1 Teknik Analisis Data



Sumber: Metodologi Penelitian Kualitatif (H.B. Sutopo, 2006).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun terletak di Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Kota Madiun. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro dan perindustrian di wilayah Kabupaten Madiun. Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2016. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro dan perindustrian. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro dan perindustrian
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro dan perindustrian

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro dan perindustrian
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro dan perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam struktur organisasi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro dan perindustrian

- b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

- c. Bidang Perdagangan, membawahi:

- 1) Seksi Pengembangan Usaha;

Seksi Pengembangan Usaha ini dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun uraian tugas pada Seksi Pengembangan Usaha ini antara lain sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Usaha;
- b) Merencanakan sosialisasi NSPK dan menganalisis dokumen terkait dokumen terkait penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- c) Menganalisis dokumen penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- d) Memproses dokumen penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- e) Membuat konsep rekomendasi dan/ penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- f) Membuat konsep rekomendasi, menganalisis dan/ penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- g) Menganalisis masalah ketersediaan dan pemantauan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting serta Operasi Pasar;

- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Usaha; dan
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Seksi Pengembangan Usaha ini merupakan seksi yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas Seksi Pengembangan Usaha poin (g) yaitu pengadaan Operasi Pasar.

- 2) Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan
- 3) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen
- d. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 - 1) Seksi Pengelolaan Pendapatan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Ketertiban dan Kebersihan Pasar
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Usaha Koperasi; dan
 - 3) Seksi Usaha Mikro.
- f. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1) Seksi Sarana Industri;
 - 2) Seksi Usaha Industri dan Produksi; dan

- 3) Seksi Standarisasi dan Desain Produk Industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun adalah:

(Terlampir).

Dari uraian diatas, program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ditangani oleh Seksi Pengembangan Usaha Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Pada Seksi Pengembangan Usaha ini diberikan tugas untuk mempersiapkan, melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun

Pada dasarnya pelaksanaan suatu program juga merupakan suatu proses belajar bagi para pelaksana sendiri, sehingga dibutuhkan aspek untuk melihat efektivitas yaitu seberapa jauh suatu kegiatan atau program maupun kebijakan itu dapat berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya.

Dalam melihat efektivitas program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dapat dilihat dari beberapa dimensi seperti yang

dikemukakan Nakamura (dalam Wahab, 1997: 43) yang mengemukakan tentang lima dimensi yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas sebuah program. Adapun kelima dimensi itu adalah, pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien dan sistem pemeliharaan. Dengan menggunakan kelima dimensi ini diharapkan dapat melihat efektivitas pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan kelima dimensi ini lebih dapat menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program karena melibatkan tidak hanya aparat birokrasi sebagai pembuat program tetapi juga melibatkan pengguna yaitu masyarakat sehingga dapat menilai lebih nyata tanpa rekayasa.

Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Agus Soejudi selaku Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyatakan bahwa:

“Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini adalah program bantuan subsidi harga kebutuhan pokok yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun untuk membantu masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun, mbak. Kurang lebih program ini sudah ada sejak 17 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus berjalan. Kalau untuk waktu pelaksanaannya ya tiap tahun ada, mbak. Tiap tahunnya kita melaksanakan di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Dari 15 kecamatan tersebut, terdapat satu desa yang menjadi tempat pelaksanaan Pasar Murah ini. Setiap tahun lokasi desa yang mendapat bantuan Pasar Murah ini juga beda-beda biar merata, agar masyarakat Kabupaten Madiun yang kurang mampu dapat merasakan bantuan subsidi harga ini” (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

Selanjutnya, Bapak Agus Soejudi juga menambahkan:

“Untuk per tahunnya, teknis pelaksanaan program ini dilakukan setiap sebulan sekali atau bahkan bisa sebulan dua kali di desa-desa yang berbeda pada setiap kecamatan sesuai yang tercantum di SK Bupati yang kita gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program ini. Kalau untuk tahun anggaran 2017 kita mengacu pada Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/69/KPTS/402.013/2017 tentang subsidi harga kebutuhan pokok melalui kegiatan Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu”(Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini bukan merupakan program baru. Namun program bantuan subsidi harga ini telah ada sejak 17 tahun yang lalu diberikan kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun. Hingga sampai saat ini juga program ini terus berjalan diberikan ke 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Untuk setiap kecamatan sendiri terdapat satu desa yang menjadi desa tempat pelaksanaan Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini.

Adapun desa penerima program Pasar Murah ini juga berbeda-beda di setiap pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar program ini dapat dirasakan merata oleh masyarakat miskin di Kabupaten Madiun. Untuk tahun anggaran 2017, pelaksanaan Pasar Murah ini mengacu pada Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/69/KPTS/402.013/2017 tentang subsidi harga kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin melalui pasar murah kepada masyarakat desa yang dilaksanakan dalam kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun.

Penanggung jawab dari pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Seperti yang dijelaskan Bapak Agus Soejudi menyatakan bahwa:

“Pasar Murah ini pelaksananya kami Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Penanggung jawabnya juga kami, mbak. Ya bisa dikatakan kami *leading sector* nya. Mulai dari persiapan komoditi yang disubsidi hingga pendistribusian kupon ke masyarakat kami yang *handle*. Untuk pencairan anggarannya kami melibatkan instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun. Setelah anggaran cair, baru pelaksanaannya di lapangan kami yang mengerjakan.” (Wawancara, pada tanggal 15 Mei 2018)

Dari petikan wawancara tersebut peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dalam program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu ini memang cukup sentral yaitu sebagai pelaksanan dan penanggung jawab pelaksanaan program ini. Mulai dari persiapan hingga pendistribusian kupon Pasar Murah juga merupakan tugas dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Adapun untuk pencairan anggarannya meminta ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.

Sebuah program tercipta untuk mencapai suatu tujuan, sama halnya dengan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini. Bapak Agus Soejudi mengatakan bahwa:

“Program Pasar Murah BST ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Madiun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti beras, mie instan, gula dan

minyak goreng. Kalau harga di pasar biasa mahal, disini harga kebutuhan pokok tersebut kita subsidi jadi lebih murah dan terjangkau untuk dibeli masyarakat. *Alhamdulillah*, masyarakat responnya sampai sejauh ini senang dan antusias tiap pelaksanaan program ini di desanya”. (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

“Apalagi untuk desa yang lokasi terpencil, masyarakatnya senang sekali tiap ada acara Pasar Murah di desanya. Seperti misal kayak Desa Klangon Kecamatan Saradan itu kan lokasinya jauh ya, akses kesana juga susah, terpencil dari perkotaan. Dengan adanya Pasar Murah ini selain barang yang dijual lebih murah juga seperti jemput bola, mereka tidak usah jauh-jauh ke pasar untuk beli sembako.” (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

Berdasarkan petikan wawancara diatas menunjukkan bahwa tujuan dari adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu ini adalah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Madiun serta meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu dengan adanya program Pasar Murah BST ini masyarakat dimudahkan dengan sistem jemput bola sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke pasar tradisional/modern untuk membeli kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Tentunya juga dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dengan menggunakan lima dimensi efektivitas seperti yang dikemukakan Nakamura (dalam Wahab, 1997: 43). Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti di lapangan

dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan

Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan program. Meskipun program telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah diimplementasikan, namun tanpa hasil seperti yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak berhasil atau gagal. Dalam hal ini melihat tujuan awal adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun apakah sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Ibu Dyah Kuswardani selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyatakan:

“Kami sebagai pelaksana dan penanggungjawab program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan yang tertera di SK Bupati, mbak. *Alhamdulillah*, tujuan dari program ini pun telah tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan. Program ini juga sudah berjalan lama ya mbak, kalau tidak efektif tidak mungkin akan berlangsung sampai selama ini. Masyarakat yang menerima kupon Pasar Murah ini juga terlihat senang dan terbantu dengan adanya program ini. Hal tersebut terlihat saat proses pelaksanaan program ini di lapangan. Ya berarti program ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adanya program Pasar Murah BST ini juga sudah diakui dan diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pemerintahan Desa.” (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

“Anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun kan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per desa juga

sudah kami alokasikan dengan baik. Kami juga sudah melakukan perjanjian kesepakatan harga dengan Usaha Dagang (UD) Hari Terang sebagai *partner* kami dalam menyiapkan program Pasar Murah ini terkait penyediaan sembakonya.”(Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro seperti diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya program ini yaitu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Madiun serta meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok telah tercapai. Terbukti dengan masyarakat yang merasa senang dan terbantu dengan adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini. Adapun pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini juga telah dilaksanakan sebagai mana mestinya sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan aturan yang menjadi acuan yaitu Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/69/KPTS/402.013/2017 tentang subsidi harga kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin melalui pasar murah kepada masyarakat desa yang dilaksanakan dalam kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yatini, warga RT 22 RW 04 Desa Klangon Kecamatan Saradan yang menerima kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) menyatakan bahwa:

“Senang mbak dapat kupon Pasar Murah. Kemarin saya rela antri untuk dapat beli sembako di Pasar Murah yang dilaksanakan di

Klangon ini. Saya *nggak* perlu ke pasar mbak, disini mau ke pasar jauh. Kalau ada Pasar Murah BST kan tinggal antri trus nunjukin kupon yang didapat trus bayar dengan harga yang udah disubsidi pemerintah, mbak. *Alhamdulillah* membantu kami *wong cilik* dan bisa ketemu Pak Bupati juga, mbak. Kapan lagi desa saya dikunjungi Bupati.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2018)

Sementara itu Bapak Pardi, warga dari RT 27 RW 04 Desa Klangon Kecamatan Saradan juga mengungkapkan bahwa:

“Pasar Murah BST ini program bagus mbak, sesuai yang kami harapkan, membantu sekali ke masyarakat dan ini kan menyeluruh ya. Teman saya di kecamatan lain juga dapat. Orang desa kayak saya begini pasti senang mbak kalau dikasih bantuan. Walaupun disini kita tetap harus beli, bukan diberi begitu saja. Tapi harganya kan lebih murah dari harga di pasar pada umumnya. Ini membantu meringankan beban kami akan kebutuhan sembako. Apalagi Desa Klangon ini kan desanya jauh dari pasar mbak, bisa dibilang terpencil. Kita saja mau ke pasar harus lewat hutan-hutan dulu. Kalau ada Pasar Murah BST begini kan enak, mbak. Kita tidak usah jauh-jauh ke pasar, beli di Pasar Murah BST malah harganya jauh lebih murah.”(Wawancara pada tanggal 18 Mei 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Klangon, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagai salah satu desa penerima program bantuan Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini merasa terbantu dan senang dengan adanya pelaksanaan Pasar Murah BST ini di desanya. Dengan adanya Pasar Murah BST ini mereka merasa bahwa beban akan pemenuhan kebutuhan pokok terasa lebih ringan dengan membeli harga sembako yang lebih murah dari harga pasar pada umumnya. Selain itu konsep jemput bola yang diterapkan pada program Pasar

Murah ini juga lebih memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus jauh-jauh ke pasar tradisional pada umumnya yang notabene jauh dari tempat tinggal mereka.

b. Efisiensi

Efisiensi berarti ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Efisiensi menjadi salah satu dimensi dalam melihat efektivitas program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun ini. Efisiensi dalam hal ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk program ini, waktu pelaksanaan, sumber daya dan tenaga yang digunakan. Informasi yang diperoleh dari Ibu Dyah Kuswardani selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyatakan bahwa:

“Ini anggaran dari Pemerintah Kabupaten Madiun kan per desanya dapat Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mbak. Ya kami sebagai pelaksana mencoba untuk sebisa mungkin dengan anggaran segini ini bisa mencakup subsidi seluruh komoditi yang nanti hendak dijual kembali di Pasar Murah BST. Kami sudah bekerjasama dengan UD. Hari Terang untuk penyediaan komoditinya. Jadi kami belanja empat komoditinya disitu. Nah, untuk total subsidi yang diberikan itu jika dihitung rinci sebesar Rp 19.990.000,- (sembilan belas juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Artinya ini tidak lebih dari anggaran yang diberikan dan memang sudah kami sesuaikan. Ini juga semua sudah kami SPJ kan” (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

“Dari segi waktu pelaksanaan juga sudah tepat sesuai SK Bupati, mbak. Urutan jadwal pelaksanaan di desa mana saja

Pasar Murah BST ini harus digelar, juga sudah sesuai SK Bupati. Tidak ada yang *mbleset*, semua tepat waktu seperti yang telah ditetapkan. Walaupun pernah sekali anggaran telat cair, itu kami tetap *back up* dulu dan program tetap berjalan sesuai tanggal yang telah ditentukan. Karena kami tidak mau pelaksanaannya jadi molor karena anggaran telat cair” (Wawancara 16 Mei 2018)

“Untuk masalah sumber daya manusianya, ya di lapangan teman-teman kami di Bidang Perdagangan semua ikut bantu, baik Kabid, Kasi maupun staf semua ikut bantu pelaksanaannya. Kemarin beberapa dari pihak kepolisian yang ikut mengamankan pelaksanaan Pasar Murah juga ikut turun tangan membantu, mbak. Karena setiap pelaksanaan Pasar Murah kan memang didampingi dari TNI dan Polri untuk menjaga agar pelaksanaan Pasar Murah ini tetap kondusif.” (Wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pihak pelaksana Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sendiri telah melaksanakan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini dengan seefisien mungkin baik dari segi penggunaan anggarannya juga sesuai ketentuan, waktu pelaksanaannya tepat waktu, hingga ke sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini juga telah saling berkerjasama antar instansi dengan baik di lapangan. Walaupun pernah sekali anggaran untuk pelaksanaan Pasar Murah BST ini terlambat turun, namun Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tetap mampu mengatasinya tanpa mengubah jadwal pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro telah melaksanakan program tersebut sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang tertera

pada SK Bupati Madiun Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2017 tentang Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST).

c. Kepuasan kelompok sasaran

Aspek ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengelola hasil-hasil program tersebut. Dalam hal ini masyarakat penerima kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini yang merasakan apakah sudah puas dengan adanya bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini atau belum.

Untuk melihat bagaimana kepuasan masyarakat penerima kupon Pasar Murah BST terkait program ini, Bapak Nyono warga RT 24 RW 04 Desa Klangon Kecamatan Saradan memberikan argumennya sebagai berikut:

“Ya *alhamdulillah* puas mbak dapat bantuan kupon ini kan harga sembakonya jadi murah. Tapi kalau bisa jenis sembakonya ditambah gitu. Soalnya barang yang disubsidi kan cuma empat jenis mbak beras, mie instan, gula pasir sama minyak goreng. Ya mungkin bisa sekalian telur untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saya senang dan puas karena adanya program ini membantu dan bermanfaat bagi saya yang kerja *serabutan* gini, karena apa-apa sekarang mahal mbak. Dengan adanya Pasar Murah BST ini ya manfaatnya saya bisa belanja sembako murah dan kebutuhan pokok juga terpenuhi.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2018).

“Tapi tetangga saya ada lo mbak yang tidak dapat kupon Pasar Murah. Jadi dia tidak bisa membeli sembako pas ada Pasar Murah disini. Saya juga tidak tau kenapa dia bisa tidak dapat. Padahal jauh hari sebelum pelaksanaan Pasar Murah, Pak Lurah sama Pak RT sudah mengabarkan dan Pak RT juga sudah membagi-bagikan kupon ke warganya sebelum Pasar Murah berlangsung.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa warga penerima kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini sudah cukup puas dengan adanya program dari Pemerintah Kabupaten Madiun ini. Mereka juga merasa program ini membantu dan ada manfaatnya bagi keberlangsungan hidup mereka. Namun demikian warga masih ada yang mengeluhkan dengan jenis komoditi sembako yang disubsidi seharusnya ditambah, seperti misalnya telur juga ikut dijual di Pasar Murah dengan harga yang bersubsidi. Selain itu, mereka juga mengeluhkan ada tetangga mereka yang tidak menerima kupon Pasar Murah BST. Padahal Kepala Desa dan Ketua RT sudah membagikan kupon tersebut jauh sebelum pelaksanaan Pasar Murah ini berlangsung di Desa Klangon ini.

Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Bapak Didik Kuswandi mengungkapkan argumennya seperti berikut:

“Program Pasar Murah ini kan program yang sudah lama ada di Kabupaten Madiun. Jadi masyarakat memang menanti-menanti dan antusias dengan adanya penjualan sembako murah oleh Pemerintah Kabupaten Madiun ini. Sebelum pelaksanaannya juga saya sudah diajak berkoordinasi dengan pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, yaitu Pak Agus Soejudi untuk membahas pendistribusian kuponnya. Setelah berkoordinasi dengan beliau, saya mengumpulkan para Ketua RT di Desa Klangon agar nanti mereka yang membagikan kuponnya ke warga di wilayah masing-masing” (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018)

“Kalau masyarakat miskin yang berhak menerima kupon Pasar Murah ini kriteria nya saya pakai kriteria miskin dari BPS, mbak. Nah, hal ini juga saya sampaikan ke seluruh Ketua RT di desa Klangon ini. Saya menghimbau kepada mereka untuk

membagikan kupon ini dengan tepat sasaran dan sesuai kriteria miskin yang menjadi acuan kita. Sejauh ini semua lancar-lancar saja, kalau ada yang tidak dapat kupon itu mungkin pas pembagian kupon orangnya tidak ada ditempat, mbak. Karena saat pembagian kupon kan harus diterima yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan. Sistemnya kan didatangi satu per satu rumah warga penerimanya” (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Klangon, Didik Kuswandi seperti diatas menyatakan bahwa pendistribusian kupon ini sudah distribusikan kepada warga miskin di Desa Klangon sesuai dengan kriteria miskin menurut BPS dan Bapak Didik menambahkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan seluruh Ketua RT di desanya untuk pendistribusian kupon ini agar bisa tepat sasaran. Adanya warga yang tidak menerima kupon ini dikarenakan pada saat pembagian kupon kepada warga tersebut sedang tidak berada di tempat, sehingga ia tidak mendapatkan kupon Pasar Murah ini. Adapun sistem pendistribusian Pasar Murah ini dilakukan dengan cara mendatangi satu per satu rumah warga penerimanya.

d. Daya tanggap klien

Respon atau daya tanggap masyarakat sebagai klien terhadap bantuan subsidi harga kebutuhan pokok melalui program Pasar Murah ini juga ikut menentukan efektivitas program tersebut. Bila respon atau daya tanggap dari masyarakat positif maka peran serta mereka pada program ini juga akan meningkat. Masyarakat akan merasa ikut senang dan memiliki dengan adanya program yang dikeluarkan Pemerintah

Kabupaten Madiun ini. Dengan begitu program akan mudah untuk diimplementasikan.

Bapak Nyono warga RT 24 RW 04, warga penerima kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang penulis temui menyatakan:

“Tanggapan saya soal program ini jujur saya senang dan merasa terbantu akan adanya subsidi harga sembako. Masyarakat kecil seperti saya ini tentu mendukung bila ada program bantuan yang sifatnya meringankan beban hidup kami. Kemarin itu pas pelaksanaanya saja saya bilang ke tetangga-tetangga kalau adanya bantuan seperti ini harus dimanfaatkan, jangan sampai kita melewatkannya. Pemerintah sudah mau bantu kok, ya kami ikut berpartisipasi. Senang mbak, bersyukur dapat bantuan seperti ini.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2018).

“Tentu mendukung sekali ya mbak dengan program Pasar Murah BST ini. Harapan saya ini terus ada lah, karena kami menantikan banget ada bantuan kayak gini. Tapi ini saya ingin memberikan saran ke pelaksana, semoga ya bisa dipastikan lah semua warga yang miskin itu bisa dapat kupon, jangan sampai ada yang terlewat. Selain itu juga jangan sampai salah sasaran, pernah ada yang ikut beli sembako di Pasar Murah BST itu orang mampu lo, mbak. Saya juga tidak tau kenapa bisa seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa sebenarnya warga sudah memberikan tanggapan yang positif dan merasa senang sekaligus terbantu dengan adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini. Namun demikian, warga tetap ada yang mengeluhkan kerancuan pendistribusian kupon sehingga menimbulkan kejadian ada masyarakat yang masuk golongan mampu

namun tetap membeli kebutuhan pokok di kegiatan Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST). Hal ini yang menjadi koreksi dari pelaksanaan Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Klangon Kecamatan Saradan.

Menanggapi hal tersebut Bapak Widodo selaku Ketua RT 24 Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menyampaikan argumennya:

“Disini saya sebagai Ketua RT tugasnya membagikan kupon langsung ke warga miskin, mbak. Sistemnya saya datang satu per satu rumah warga (*door to door*). Lalu nanti mereka tanda tangan bukti telah menerima kupon Pasar Murah BST. Kalau masalah warga miskin yang tidak dapat kupon itu karena pas saya ke rumah mereka tidak ada di rumah mbak”. (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018).

“Kalau masalah orang yang mampu justru yang beli sembako di Pasar Murah, sedangkan yang tidak mampu malah tidak beli itu bukan karena salah sasaran ya, mbak. Hal itu karena biasanya warga miskin yang dapat kupon itu tidak punya uang untuk beli sembako, lalu kuponnya diberikan ke orang yang mampu nanti mereka bagi hasil. Mereka sama untungnya. Saya tidak bisa cegah karena itu kesepakatan mereka. Namun kedepannya saya akan lebih mengawasi agar kejadian itu tidak terulang kedua kali” (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip seperti diatas menjelaskan bahwa sebenarnya masalah kerancuan pendistribusian kupon itu hanya kesalahpahaman saja, karena sistem pembagian kupon sudah dilakukan sesuai aturan yaitu *door to door* kepada masyarakat miskin. Jika ada warga yang kondisinya mampu membeli barang di

Pasar Murah BST dengan mendapatkan kupon dari warga yang tidak mampu, itu merupakan kesepakatan mereka berdua yang nantinya akan bagi hasil dari barang yang sudah dibeli di Pasar Murah. Hal itu dikarenakan warga miskin yang mendapat kupon ini sedang tidak mempunyai uang untuk berbelanja sembako di Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST). Ketua RT setempat menyatakan akan lebih mengawasi hal tersebut agar tidak terjadi untuk kedua kali.

e. Sistem Pemeliharaan

Program yang baik juga harus diikuti oleh sistem pemeliharaan yang baik atas program tersebut. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang baik dan *continue* maka betapapun baiknya hasil program akan terhenti begitu saja jika tidak dikelola dengan baik. Seperti pada program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini merupakan bantuan subsidi harga kebutuhan pokok yang harus terus dilakukan pelaksanaannya secara *continue* (berkelanjutan) agar manfaat dan kebaikannya dapat terus dirasakan oleh masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun.

Ibu Dyah Kuswardani selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyatakan bahwa:

“Keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan Pasar Murah BST ini tentu ada mbak. Seperti sering masyarakat *complain* ingin komiditinya ditambah. Bukan hanya beras, minyak goreng, mie instan dan gula. Tapi bisa ditambah telur misalnya. Namun perlu diketahui anggaran dari Pemerintah Kabupaten

Madiun memang hanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kami tidak bisa meminta lebih karena itu sudah aturan, kami hanya wajib melaksanakannya sesuai anggaran. Anggaran yang tidak segera turun, itu kami harus nalangi dulu baru nanti kalau anggaran sudah turun diganti. Tapi sejauh ini itu tidak terlalu menjadi masalah berarti dan tidak mengganggu pelaksanaan Pasar Murah BST, karena hanya pernah terjadi sekali seperti itu dan selebihnya lancar saja dan tepat.” (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2018)

Menanggapi masalah kerancuan pendistribusian kupon, Ibu

Dyah Kuswardani juga memberikan argumennya sebagai berikut:

“Kalau masalah kerancuan pendistribusian kupon yang ada di Klangon itu yang lebih paham Kepala Desa dan Ketua RT yang setempat ya, mbak. Karena dari kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat agar kupon ini diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Mereka yang tau *real* kondisi warganya. Perlu diketahui dari kami memberikan kupon ke Kepala Desa agar nanti dibagikan ke warganya lewat Ketua RT itu sebanyak 380 lembar kupon beras, 950 lembar kupon minyak goreng, 950 lembar kupon gula pasir dan 768 kupon mie instan. Itu sudah kami hitung dan kami sesuaikan dengan besaran subsidiya”. (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2018)

Ibu Dyah Kuswardani juga kembali menambahkan:

“Sistem pemberian kupon memang seperti itu ya *door to door*, kalau ada yang tidak menerima ya karena warga penerima ini sedang tidak berada di rumah. Kalau masalah ada orang yang kondisinya mampu tapi beli di Pasar Murah itu kan sudah kesepakatan dia dengan warga miskin yang punya kupon. Kuponnya diberikan ke orang yang mampu nanti hasil belanjanya bagi hasil dengan mereka (warga miskin). Asal sama-sama mau dan merasa tidak dirugikan tidak apa-apa. Toh, sampai sejauh ini baik-baik saja, semua berjalan lancar dan masyarakat tetap puas dengan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini. Tapi kami ya tetap akan melakukan pengawasan lebih dalam bekerja sama dengan perangkat desa setempat agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.” (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2018)

“Masyarakat tetap senang dan merasa terbantu dengan adanya program ini. Hal tersebut dikatakan oleh mereka sendiri. Kami juga tetap melakukan pengawasan ketat pada saat pelaksanaan Pasar Murah dan meminta bukti kepada Kepala Desa setempat untuk tanda tangan warga penerima kupon. Hal ini juga kami gunakan untuk pertanggung jawaban (SPJ) kami yang akan dicek pihak Inspektorat.” (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan Ibu Dyah Kuswardani seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan atau masalah dalam pelaksanaan program Pasar Murah ini memang cukup beragam mulai dari anggaran yang tidak seberapa besar, anggaran telat pencairannya dan masalah pendistribusian kupon. Terlepas dari itu masyarakat tetap merasa senang dan terbantu dengan adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro juga tetap professional menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dan penanggung jawab program ini.

Untuk mempertahankan atau menjaga kontinuitas program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun diwakili Ibu Dyah Kuswardani selaku selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Bidang Perdagangan, menyatakan bahwa:

“Kami akan terus berkomitmen menjalankan program ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun memang sudah mengalokasikan dana untuk program ini setiap tahunnya. Terbukti ini sudah jalan 17 tahun lebih dan setiap tahun selalu ada. Kedepan program ini akan terus berjalan mengingat antusiasme dan respon dari masyarakat yang cukup baik dan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun

sendiri. Selain itu juga kami menjaga kekompakan dan profesionalitas tim Pasar Murah di dinas kami ini, mbak. Kaitannya dengan teman-teman di Bidang Perdagangan agar tetap solid dan profesional dalam menjalankan program Pasar Murah BST sesuai dengan tujuan utamanya.” (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten berkomitmen untuk menjalankan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini dengan sebaik-sebaiknya dan menjaga keberlangsungannya karena memang Pemerintah Kabupaten Madiun sudah menganggarkan dana untuk program ini setiap tahunnya. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten juga menjaga profesionalitas dan kekompakan tim Pasar Murah agar mampu bekerja secara maksimal untuk menjalankan program ini dengan baik dan sesuai tujuan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) sudah cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari analisis peneliti berdasarkan data yang didapatkan dengan teori yang digunakan.

1. Pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan

Pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini telah mencapai tujuannya sesuai yang tertera di Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/69/KPTS/402.013/2017 yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Madiun serta meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok. Masyarakat miskin penerima bantuan subsidi harga kebutuhan pokok ini merasa senang dan terbantu dengan adanya program Pasar Murah BST ini. Di Pasar Murah BST yang diselenggarakan di desa mereka masing-masing ini, mereka dapat membeli beras, minyak goreng, gula pasir dan mie instan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar pada umumnya.

2. Efisiensi

Pelaksanaan Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) sudah efisien, baik secara anggaran, waktu pelaksanaan maupun sumber daya manusianya. Walaupun pernah terjadi keterlambatan pencairan

anggaran, namun Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten tetap mampu melaksanakan Pasar Murah BST ini dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak mengecewakan para warga penerima program ini.

3. Kepuasan kelompok sasaran

Kepuasan kelompok sasaran menjadi hal yang penting bagi adanya suatu program atau kebijakan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun merasa senang, antusias dan terbantu dengan adanya program Pasar Murah BST ini. Mereka dapat membeli sembako dengan harga yang terjangkau dan tidak perlu harus ke pasar karena sistem pelaksanaan program Pasar Murah BST ini jemput bola atau mendatangi warga. Hal ini tentu sangat membantu bagi warga masyarakat miskin yang desanya terpencil dan jauh dari pasar seperti Desa Klangon, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tempat peneliti melakukan penelitian pada kelompok sasaran. Warga merasa diringankan bebannya akan kebutuhan pokok lewat adanya program ini.

4. Daya tanggap klien

Respon dari masyarakat akan adanya program Pasar Murah BST ini cukup baik. Terbukti dengan mereka yang meramaikan acara pelaksanaan program Pasar Murah BST ini di desanya dan bahkan mereka rela antri demi mendapatkan sembako murah. Warga miskin penerima bantuan Pasar Murah BST ini juga mendukung agar program

ini terus ada. Mereka memberikan masukan atau saran agar pemerintah memastikan pendistribusian kupon Pasar Murah BST ini berjalan dengan baik. Terlepas daripada itu mereka menyatakan merasa terbantu dengan adanya program Pasar Murah BST ini.

5. Sistem pemeliharaan

Sistem pemeliharaan ini berkaitan dengan hambatan yang terjadi dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Madiun mengatasi hambatan tersebut dan tetap berkomitmen untuk menjalankan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun berkomitmen untuk mempertahankan dan menjaga kontinuitas program ini agar berjalan terus hingga ke tahun-tahun selanjutnya. Karena memang Pemerintah Kabupaten Madiun juga setiap tahun selalu menanggarkan dana untuk keberjalanan program ini. Selain itu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun juga akan melakukan pengawasan pada pelaksanaan program Pasar Murah BST ini agar program ini dapat terlaksana sesuai tujuannya. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun juga terus menjaga profesionalitas dan kekompakan tim agar dapat menjalankan program Pasar Murah BST ini dengan baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran yaitu:

- Memperbaiki sistem pendistribusian atau pembagian kupon Pasar Murah ke masyarakat miskin yang berhak menerimanya

Jika masyarakat miskin yang diberi kupon Pasar Murah sedang tidak berada ditempat (dirumah) hendaknya penerima kupon bisa diwakilkan atau tidak harus yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat miskin yang memang seharusnya mendapat kupon Pasar Murah dapat mendapatkan haknya walaupun beliau sedang tidak berada di rumah pada saat pembagian kupon oleh Ketua RT. Jika penerima kupon yang sedang tidak berada di rumah tersebut bisa diwakilkan oleh anaknya atau saudaranya tentu ini lebih memperhatikan sisi keadilan bagi masyarakat miskin tersebut. Mereka sebenarnya berhak mendapatkan kupon Pasar Murah, namun karena sistem pendistribusian yang seperti itu membuat mereka tidak bisa mendapatkan kupon. Padahal ketidakberadaan mereka di rumah bisa saja dikarenakan sedang sakit atau keperluan lainnya yang memang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini tentu membuat ketidakadilan bagi masyarakat miskin yang seharusnya mendapat kupon, namun pada saat pendistribusian kupon sedang tidak berada di rumah. Sistem pendistribusian kupon Pasar Murah ini yang harus diganti atau diperbaiki. Selain itu jika sistem pendistribusian bisa diperbaiki secara lebih adil, ini juga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kupon

oleh aparat desa setempat bilamana ada kupon yang tidak sampai pada masyarakat miskin yang seharusnya menerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto dan Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2017). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2014 – 2016. (<https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/66>, diakses pada 25 Oktober 2017 pukul 18.15).
- Budiani, N. W. (2007). “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Vol. 2 Nomor 1, hal 53-55.
- Buku Putih Kabupaten Madiun. Pokja Sanitasi Kabupaten Madiun. (<https://documents.tips/documents/bab-ii-buku-putih-kabmadiun-171011kompres-picture23.html>, diakses pada 25 Oktober 2017 pukul 20.17)
- Choi, Seligman and Basu (2017). “Cost Effectiveness of Subsidizing Fruit and Vegetable Purchases Through the Supplemental Nutrition Assistance Program”. *American Journal of Preventive Medicine*, 2017;52(5):e147–e155
- Christina, N. (2013). “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan di Kabupaten Malinau (Studi pada Kecamatan Kayan Selatan)”. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. Vol. 1 Nomor 1, hal: 65-74
- Hartawan, T. (2017). 10 Persen Penduduk di Pulau Jawa Dikategorikan Miskin. (<https://bisnis.tempo.co/read/892164/10-persen-penduduk-di-pulau-jawa-dikategorikan-miskin#bfz2OsaSr7IMxoCR.99>, diakses pada 28 Oktober 2017 pukul 18.45)
- Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2017 tentang Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Miskin melalui Pasar Murah kepada Masyarakat Desa yang Dilaksanakan dalam Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Laksmi, S. (2017). Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. (<https://www.kompasiana.com/slaksmisari/kemiskinan-di-provinsi-jawa->

timur_5900c44cce7e616b52aaf3bd, diakses pada 20 Oktober 2017 pukul 11.40)

Nuradilla, F. (2016). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Bhakti Sosial Terpadu (BST) (Studi pada Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. (<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1373>, diakses pada 25 Oktober 2017 pukul 23.14)

Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Keja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun

Program Keluarga Harapan. (2016). 14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS. (<http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>, diakses pada 23 April 2018 pukul 20.10)

Proposal Kegiatan Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Kabupaten Madiun

Rachman, F. (2017). Orang Miskin Terbanyak di Jawa, Persentase Terbesar di Maluku-Papua. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/3563157/orang-miskin-terbanyak-di-jawa-persentase-terbesar-di-maluku-papua>, diakses pada 28 Oktober 2017 pukul 21.33)

Ratminto dan Winarsih. (2010). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sartika, Balaka dan Rumbia (2016). “Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 1 Nomor 1 E-ISSN: 2503-1937, hal: 106-118.

Siagian, S. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Sovacool, B. K. (2017). “Reviewing, Reforming, and Rethinking Global Energy Subsidies: Towards a Political Economy Research Agenda.”. *Ecological Economics* 135, pp 150-163.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sutopo, H. B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

SPJ Subsidi Harga Kebutuhan Pokok melalui Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Klangon Kecamatan Saradan Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)* Jakarta: Bumi Aksara

Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)* Jakarta: Bumi Aksara

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo

LAMPIRAN

Gambar Pelaksanaan Program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST)
oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun di
Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Bapak Bupati dan Wakil Bupati Madiun serta Kapolres Madiun ikut berpartisipasi dalam penjualan sembako Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST)





Bapak Bupati dan Wakil Bupati Madiun memberikan pengarahan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan penjualan sembako di Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST)



Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

Gambar Lokasi Penelitian



PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PROGRAM PASAR PASAR MURAH BHAKTI SOSIAL TERPADU (BST) OLEH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN

A. Bagi Pelaksana (Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun)

- Pertanyaan umum
 1. Kapan pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini dilakukan?
 2. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan program ini?
 3. Seperti apa keterlibatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun pada program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu ini (BST)?
 4. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan adanya program ini?
- Pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan
 1. Apakah pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?
 2. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam mendukung pencapaian pelaksanaan program?
- Efisiensi
 1. Apakah pelaksanaan program tersebut sebanding atau sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Madiun?
 2. Dari segi waktu pelaksanaan, apakah pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?

3. Bagaimana dengan sumber daya manusianya, apakah dengan sumber daya manusia yang ada dapat mendukung pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini?
- Sistem Pemeliharaan
 1. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) tersebut?
 2. Apakah kendala atau hambatan yang ada tersebut mengganggu keberlangsungan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini?
 3. Untuk masalah sistem pendistribusian kupon, bagaimana saudara menanggapi hal tersebut?
 4. Apa saja yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun untuk mempertahankan atau memelihara keberlangsungan dari program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini agar terus berjalan?

B. Bagi Kelompok Sasaran (Masyarakat miskin penerima kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di wilayah Kabupaten Madiun, salah satunya di Desa Klangon Kecamatan Saradan)

- Pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan
 1. Apa yang saudara rasakan dengan adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini?
 2. Apakah program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini telah sesuai dengan apa yang saudara inginkan?
 3. Apakah program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini telah mampu meringankan beban saudara terkait pemenuhan kebutuhan pokok?
- Kepuasan kelompok sasaran
 1. Apakah saudara telah merasa puas dengan pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang saudara terima ini?

2. Manfaat apa yang saudara rasakan dengan adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Madiun?
 3. Adakah yang ingin saudara sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini?
- Daya tanggap klien
 1. Bagaimana tanggapan saudara dengan adanya program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini?
 2. Apa saudara mendukung adanya pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini di desa saudara?
 3. Adakah saran atau masukan yang ingin saudara sampaikan terkait program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini?

C. Bagi pihak-pihak yang membantu pendistribusian kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST)

- Kepala Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun
 1. Bagaimana keterlibatan saudara dalam pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini?
 2. Kriteria miskin yang seperti apa yang saudara gunakan sebagai acuan dalam pemberian kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di desa saudara?
 3. Bagaimana tanggapan saudara dengan adanya kerancuan pendistribusian kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) di desa saudara?
- Ketua RT Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun
 1. Bagaimana keterlibatan saudara dalam pelaksanaan program Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini?
 2. Bagaimana sistem pembagian kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) ini kepada masyarakat miskin di wilayah saudara?

3. Bagaimana tanggapan saudara dengan adanya kerancuan pendistribusian kupon Pasar Murah Bhakti Sosial Terpadu (BST) tersebut?



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
Jalan Alun-Alun Utara No. 4 Telp. (0351) 454 322 Fax (0351) 464 195
Website : www.dinkopmadiun.com e-mail : dinkop.kab.madiun@gmail.com
MADIUN 63121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/3427/402.112/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AGUS SEOJUDI, SE
NIP : 19690405 199403 1 014
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV / a)
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Unit Kerja : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : ANISA RACHMAWATI
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret Surakarta
Bidang : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun sejak Maret 2018 sampai dengan Juli 2018 guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Efektifitas Program Pasar Murah Bhakti Sosil Terpadu (BST) Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 6 Juli 2018
a.n. KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MADIUN
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN


AGUS SEOJUDI, SE
Pembina
NIP 19690405 199403 1 014